



KEMENTERIAN  
KELAUTAN DAN  
PERIKANAN

# Laporan kinerja Triwulan ke I

**PUSAT  
MANAJEMEN MUTU**

**2026**

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja (LKj) Pusat Manajemen Mutu Triwulan I Tahun 2026 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Manajemen Mutu dalam mendukung tercapainya sasaran strategis Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, serta sebagai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Laporan ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja, realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, evaluasi pelaksanaan indikator kinerja, serta berbagai upaya perbaikan yang telah dilakukan selama Triwulan I Tahun 2026. Secara umum, capaian kinerja Pusat Manajemen Mutu menunjukkan hasil yang baik, khususnya pada indikator harmonisasi sistem jaminan mutu dan peningkatan kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium serta lembaga inspeksi. Di sisi lain, dalam pelaksanaan kegiatan masih terdapat beberapa tantangan, antara lain optimalisasi penyerapan anggaran, penguatan monitoring dan evaluasi, serta peningkatan konsistensi implementasi sistem manajemen mutu pada seluruh unit kerja. Oleh karena itu, berbagai langkah perbaikan terus dilakukan melalui penguatan koordinasi, monitoring berkala, percepatan pelaksanaan kegiatan, serta peningkatan pengendalian internal. Kami berharap Laporan Kinerja ini dapat menjadi media evaluasi dan bahan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi hasil.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja Pusat Manajemen Mutu Triwulan I Tahun 2026.

Jakarta, 18 Februari 2026

Kepala Pusat Manajemen Mutu



Woro Nue Endang Sariati

# DAFTAR ISI

|                                                 |        |
|-------------------------------------------------|--------|
| KATA PENGANTAR .....                            | ii     |
| DAFTAR ISI .....                                | iii    |
| DAFTAR GAMBAR .....                             | iv     |
| DAFTAR TABEL .....                              | v      |
| <br>RINGKASAN EKSEKUTIF .....                   | <br>vi |
| BAB I Pendahuluan .....                         | 1      |
| 1.1 Latar Belakang .....                        | 2      |
| 1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi ..... | 2      |
| 1.3 Sasaran, Indikator dan Target Kinerja ..... | 3      |
| 1.4 Sistematika Penyajian .....                 | 4      |
| BAB II Perencanaan Kinerja .....                | 7      |
| 2.1 Visi dan Misi .....                         | 7      |
| 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2026 .....         | 7      |
| BAB III Akuntabilitas Kinerja .....             | 8      |
| 3.1 Capaian Kinerja .....                       | 8      |
| 3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja .....         | 9      |
| 3.2.1 Sasaran Strategis 1 .....                 | 10     |
| 3.2.2 Sasaran Strategis 2 .....                 | 25     |
| BAB IV Penutup .....                            | 22     |
| Lampiran .....                                  | 24     |



## DAFTAR GAMBAR

|          |                                                           |    |
|----------|-----------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1 | Struktur Organisasi Pusat Manajemen Mutu Tahun 2026 ..... | 3  |
| Gambar 2 | Peta Strategi Pusat Manajemen Mutu tahun 2026.....        | 4  |
| Gambar 3 | Perjanjian Kinerja Pusat Manajemen Mutu .....             | 5  |
| Gambar 4 | Sasaran Kegiatan dan indikator kinerja .....              | 8  |
| Gambar 5 | Capaian Kinerja Manajemen Mutu .....                      | 9  |
| Gambar 6 | Capaian tidaklanjut hasil Pengawasan .....                | 21 |
| Gambar 7 | Capaian hasil tindaklanjut Pengawasan .....               | 21 |



## DAFTAR TABEL

|       |   |                                                                             |    |
|-------|---|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel | 1 | Tabel Ikhtisar Pencapaian Kinerja Pusat Manajemen Mutu TW 1 Tahun 2026..... | 10 |
| Tabel | 2 | Pencapaian IKU. 1 .....                                                     | 14 |
| Tabel | 3 | Pencapaian IKU. 6 .....                                                     | 17 |
| Tabel | 4 | Pencapaian IKU. 7 .....                                                     | 19 |
| Tabel | 5 | Pencapaian IKU. 8 .....                                                     | 24 |



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Pusat Manajemen Mutu Triwulan I Tahun 2026 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), khususnya dalam penguatan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.

Pada Triwulan I Tahun 2026, Pusat Manajemen Mutu melaksanakan pengukuran terhadap 13 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung 2 Sasaran Strategis organisasi. Dari keseluruhan indikator tersebut, terdapat 4 IKU yang memiliki target triwulan dan telah mencapai hasil melampaui target yang ditetapkan.

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) pada Triwulan I Tahun 2026 tercatat sebesar 114,35%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan secara umum telah berjalan efektif dan mendukung pencapaian target organisasi.

Beberapa capaian strategis yang berhasil dicapai antara lain:

1. Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dengan Negara Tujuan Ekspor mencapai realisasi sebesar 3 dokumen atau 150% dari target triwulan. Capaian ini didukung oleh percepatan koordinasi bilateral dan penyampaian dokumen harmonisasi kepada negara mitra dagang, yang berkontribusi terhadap penguatan pengakuan sistem mutu Indonesia di pasar internasional.
2. Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium mencapai 81,86 atau sebesar 107,72% dari target. Capaian tersebut menunjukkan meningkatnya konsistensi penerapan SNI ISO/IEC 17025:2017 pada laboratorium lingkup BPPMHKP.
3. Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi mencapai 83,26 atau sebesar 109,55% dari target. Hasil ini menunjukkan semakin baiknya implementasi sistem manajemen mutu lembaga inspeksi berbasis SNI ISO/IEC 17020:2012 dalam mendukung pelaksanaan official control yang kredibel dan akuntabel.
4. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja mencapai 100%. Capaian tersebut mencerminkan komitmen organisasi dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan sebagai bagian dari penguatan tata kelola dan pengendalian internal.

Di samping capaian tersebut, pelaksanaan program dan kegiatan pada Triwulan I Tahun 2026 masih menghadapi beberapa tantangan, terutama pada aspek penyerapan anggaran yang belum optimal. Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I tercatat sebesar Rp16.438.746,- dari total pagu anggaran sebesar Rp264.799.862.000,-. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh penjadwalan kegiatan strategis yang sebagian besar dilaksanakan pada triwulan berikutnya, proses administrasi pelaksanaan kegiatan, serta penyesuaian mekanisme pelaksanaan anggaran.

Sebagai langkah perbaikan, Pusat Manajemen Mutu melakukan penguatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, percepatan proses administrasi dan pengadaan, serta pengendalian berkala terhadap capaian kinerja dan realisasi anggaran guna meminimalkan risiko penumpukan kegiatan pada akhir tahun anggaran.

Secara umum, capaian kinerja Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Manajemen Mutu telah berjalan dengan baik dan mendukung penguatan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang efektif, konsisten, dan akuntabel.



# Bab I Pendahuluan



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuntut setiap instansi pemerintah untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Salah satu bentuk implementasi akuntabilitas tersebut diwujudkan melalui penyusunan Laporan Kinerja (LKj) sebagai media pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan serta capaian kinerja organisasi.

Penyusunan Laporan Kinerja Pusat Manajemen Mutu Triwulan I Tahun 2026 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pusat Manajemen Mutu merupakan unit eselon II pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas melaksanakan manajemen mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Manajemen Mutu memiliki peran strategis dalam mendukung penguatan sistem jaminan mutu nasional, peningkatan daya saing produk kelautan dan perikanan, serta penguatan pengakuan internasional terhadap sistem pengendalian mutu Indonesia. Hal tersebut menjadi penting dalam rangka menjaga kualitas dan keamanan produk hasil kelautan dan perikanan agar mampu memenuhi persyaratan negara tujuan ekspor dan meningkatkan kepercayaan pasar internasional.

Pada tahun 2026, pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Manajemen Mutu menghadapi berbagai tantangan strategis, antara lain peningkatan harmonisasi standar mutu internasional, penguatan konsistensi penerapan sistem manajemen mutu laboratorium dan lembaga inspeksi, optimalisasi tindak lanjut hasil pengawasan, serta penguatan tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel. Selain itu, percepatan digitalisasi proses bisnis dan peningkatan efektivitas monitoring pelaksanaan program juga menjadi fokus perbaikan organisasi.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai sarana evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan selama Triwulan I Tahun 2026, sekaligus sebagai bahan perbaikan berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas kinerja organisasi, efektivitas pelaksanaan anggaran, dan penguatan akuntabilitas kinerja Pusat Manajemen Mutu.

### **1.2 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pusat Manajemen Mutu merupakan unit eselon II pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas melaksanakan manajemen mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Manajemen Mutu menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pembangunan dan pengembangan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
2. Pengoordinasian penyusunan rancangan Standar Nasional Indonesia mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
3. Pengelolaan sistem manajemen mutu laboratorium dan lembaga inspeksi di bidang pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
4. Pengembangan laboratorium acuan, laboratorium pengujian, dan jejaring laboratorium pengujian;
5. Pengelolaan sistem ketertelusuran di bidang pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
6. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan manajemen mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
7. Pelaksanaan urusan administrasi Pusat Manajemen Mutu.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, Pusat Manajemen Mutu dipimpin oleh Kepala Pusat dan didukung oleh beberapa Tim Kerja, yaitu:

1. Tim Kerja Standarisasi Sistem dan Harmonisasi;
2. Tim Kerja Pengendalian Pelaksanaan SISJAMU;
3. Tim Kerja Sistem Manajemen Mutu;
4. Tim Kerja Dukungan Manajemen.

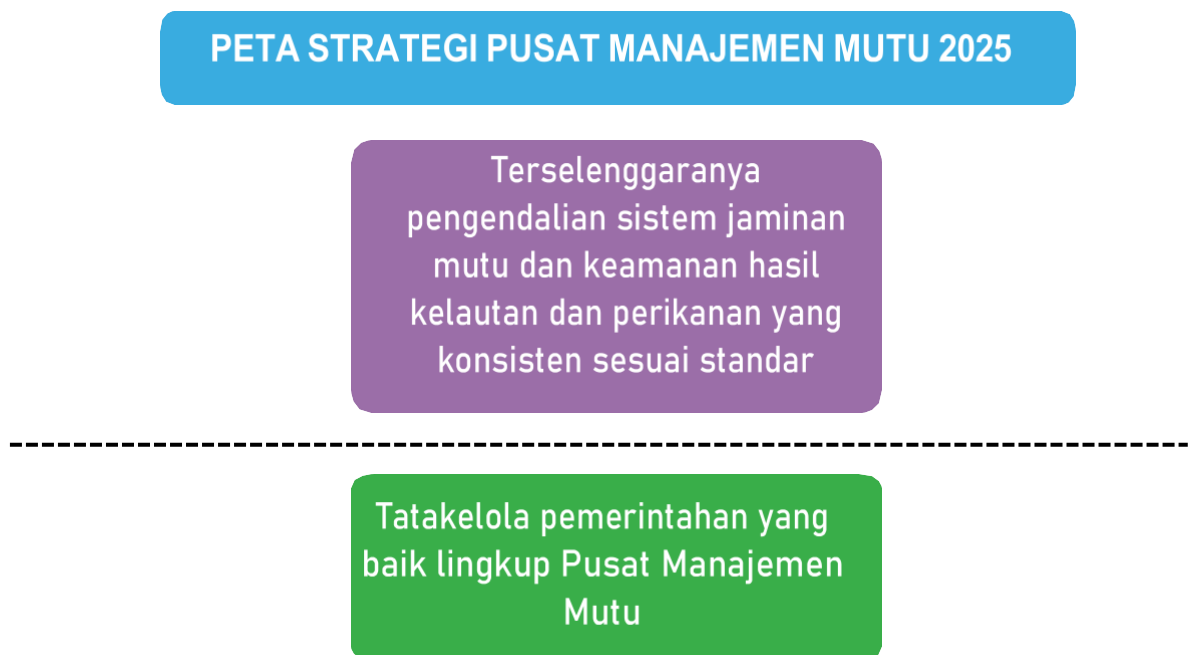
Jumlah sumber daya manusia Pusat Manajemen Mutu sampai dengan Tahun 2026 sebanyak 32 orang yang terdiri atas pejabat struktural, pejabat fungsional, pegawai pemerintah nonpegawai negeri, dan tenaga pendukung lainnya.



Gambar 1. Struktur Organisasi Pusat Manajemen Mutu Tahun 2026

## 1.2. SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur. Peta strategi, sasaran dan indikator kinerja Pusat Manajemen Mutu Tahun 2026 ditunjukkan pada Gambar 2 dan tabel 1 dibawah ini:



Gambar 2. Peta Strategi Pusat Manajemen Mutu tahun 2026

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**  
**PUSAT MANAJEMEN MUTU**

|      | Sasaran Kegiatan                                                                                                                       | Indikator Kinerja |                                                                                                                    | Target |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| SK.1 | Terselenggaranya Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang Konsisten dan Standar                              | 1                 | Harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dengan negara tujuan ekspor (dokumen)                 | 8      |
|      |                                                                                                                                        | 2                 | Persentase penanganan kasus mutu ekspor produk perikanan yang diselesaikan (%)                                     | 95     |
|      |                                                                                                                                        | 3                 | Persentase tindak lanjut rekomendasi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan (%).  | 72     |
|      |                                                                                                                                        | 4                 | Dokumen Standar sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan hulu hilir (dokumen)                              | 4      |
|      |                                                                                                                                        | 5                 | Persentase unit usaha/lembaga yang menerapkan SJMKHP (QA) Sesuai standar dan regulasi (%)                          | 73     |
|      |                                                                                                                                        | 6                 | Nilai Kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium (nilai)                                                | 76     |
|      |                                                                                                                                        | 7                 | Nilai kualitas penerapan system manajemen mutu Lembaga inspeksi (nilai)                                            | 76     |
| SK.2 | Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan Pengawasan Mutu hasil Kelautan dan Perikanan | 8                 | Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Pusat Manajemen Mutu (%) | 86     |
|      |                                                                                                                                        | 9                 | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pusat Manajemen Mutu (nilai)                           | 92,21  |
|      |                                                                                                                                        | 10                | Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pusat Manajemen Mutu (Indeks)                                                   | 82,5   |
|      |                                                                                                                                        | 11                | Nilai penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Pusat Manajemen Mutu (nilai)                                                 | 86,20  |
|      |                                                                                                                                        | 12                | Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Pusat Manajemen Mutu (%)                                                | 100    |
|      |                                                                                                                                        | 13                | Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Pusat Manajemen Mutu (nilai)                                            | 81,75  |

Gambar 3. Perjanjian Kinerja tahun 2026

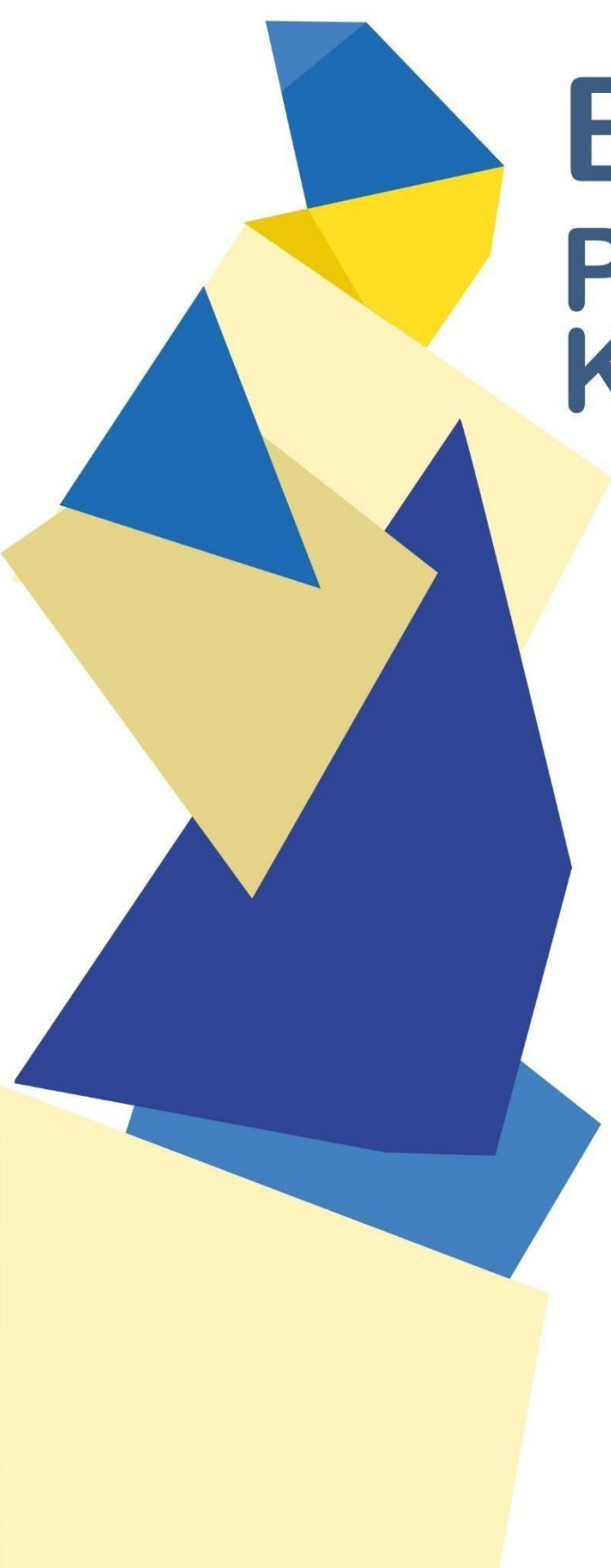


### 1.3. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Penyusunan Laporan Kinerja Pusat Manajemen Mutu Tahun 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja adalah sebagai berikut:

1. Ikhtisar Eksekutif, menyajikan tujuan, sasaran, dan capaian kinerja;
2. Bab I Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum tentang Pusat Manajemen Mutu, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi oleh Pusat Manajemen Mutu;
3. Bab II Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Pusat Manajemen Mutu;
4. Bab III Akuntabilitas Kinerja, menyajikan capaian kinerja Pusat Manajemen Mutu untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Disamping itu, dalam Bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Pusat Manajemen Mutu sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;
5. Bab IV Penutup, menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja Pusat Manajemen Mutu serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Pusat Manajemen Mutu untuk meningkatkan kinerja.



# Bab II

## Perencanaan Kinerja

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1. VISI DAN MISI

Visi, Misi dan Tujuan Pusat Manajemen Mutu, pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan selaras dengan visi misi dan tujuan Pembangunan Nasional dan Kementerian Kelautan dan Perikanan:

---

**“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”**

---

Misi Pembangunan Nasional dan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN tahun 2020–2024, KKP terutama melaksanakan 4 (empat) dari 9 (sembilan) misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia” melalui “Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi Kelautan dan Perikanan;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing” melalui “Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
3. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan” melalui “Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
4. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya” melalui “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di Kementerian Kelautan dan Perikanan”.

Menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah:

1. Peningkatan Daya Saing, pengembangan Inovasi dan Riset KP, yakni:
  - a. Kapasitas dan Kompetensi SDM KP meningkat
  - b. Inovasi dan Riset KP menguat

2. Peningkatan Kontribusi Sektor KP terhadap Perekonomian Nasional, yakni:
  - a. Pengelolaan Sumberdaya perikanan budidaya dan tangkap optimal;
  - b. Mutu, daya saing dan sistem logistik hasil KP menguat;
  - c. Pengawasan pengelolaan SDKP;
  - d. Sistem perkarantina ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan meningkat;
  - e. Pengelolaan ruang laut optimal.
3. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya KP, yakni:
  - a. Konservasi dan keanekaragaman hayati optimal.
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP, Yakni:
  - a. Kinerja Reformasi Birokrasi KKP meningkat.

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan untuk mendorong peningkatan kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pangan produk perikanan yang berkelanjutan, pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan melalui peningkatan produksi, produktivitas dan peningkatan nilai tambah, pengembangan industri perikanan hulu-hilir untuk meningkatkan daya saing, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

## 2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Sebagai upaya perbaikan perencanaan, Pusat Manajemen Mutu melakukan reviu terhadap Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pada tahun 2024. Pada tahun 2026 Perjanjian Kinerja Pusat Manajemen Mutu adalah sebagai berikut:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
PUSAT MANAJEMEN MUTU

| Sasaran Kegiatan                                                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                    | Target |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| SK.1 Terselenggaranya Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang Konsisten dan Standar                                | 1 Harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dengan negara tujuan ekspor (dokumen)                 | 8      |
|                                                                                                                                             | 2 Persentase penanganan kasus mutu ekspor produk perikanan yang diselesaikan (%)                                     | 95     |
|                                                                                                                                             | 3 Presentase tindak lanjut rekomendasi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan (%)   | 72     |
|                                                                                                                                             | 4 Dokumen Standar sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan hulu hilir (dokumen)                              | 4      |
|                                                                                                                                             | 5 Persentase unit usaha/lembaga yang menerapkan SJMKHP (QA) Sesuai standar dan regulasi (%)                          | 73     |
|                                                                                                                                             | 6 Nilai Kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium (nilai)                                                | 76     |
|                                                                                                                                             | 7 Nilai kualitas penerapan system manajemen mutu Lembaga inspeksi (nilai)                                            | 76     |
| SK.2 Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan Pengawasan Mutu hasil Kelautan dan Perikanan | 8 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Pusat Manajemen Mutu (%) | 86     |
|                                                                                                                                             | 9 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pusat Manajemen Mutu (nilai)                           | 92,21  |
|                                                                                                                                             | 10 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pusat Manajemen Mutu (Indeks)                                                  | 82,5   |
|                                                                                                                                             | 11 Nilai penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Pusat Manajemen Mutu (nilai)                                                | 86,20  |
|                                                                                                                                             | 12 Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Pusat Manajemen Mutu (%)                                               | 100    |
|                                                                                                                                             | 13 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Pusat Manajemen Mutu (nilai)                                           | 81,75  |

Gambar 4. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Pusat Manajemen Mutu Tahun 2026



# Bab III

## Akuntabilitas Kinerja

## BAB III

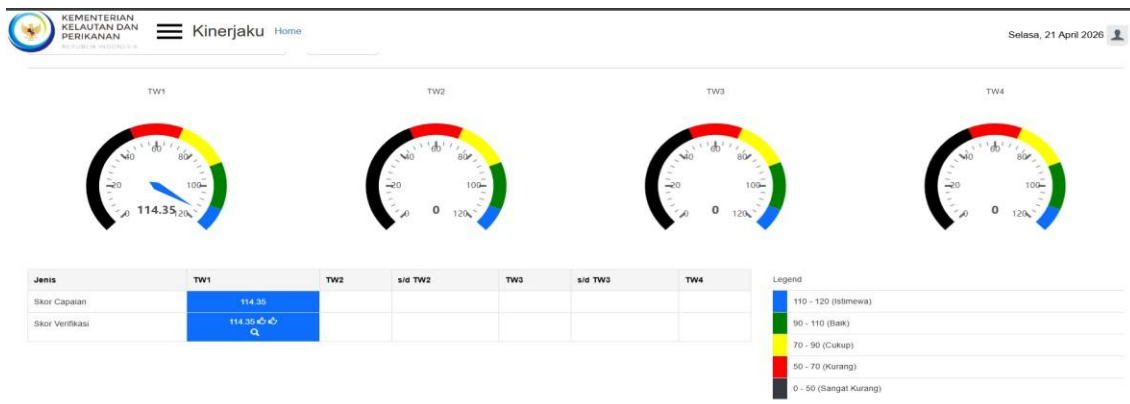
### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1. CAPAIAN KINERJA

Akuntabilitas kinerja organisasi Pusat Manajemen Mutu merupakan kinerja secara kolektif dari seluruh Ketua Tim kelompok lingkup Pusat Manajemen Mutu. Dengan didasarkan atas perjanjian kinerja level II Pusat Manajemen Mutu, telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala setiap triwulan, dan semester dengan menggunakan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) berbasis web dengan alamat [www.kinerjaku.kkp.go.id](http://www.kinerjaku.kkp.go.id).

Untuk mengukur keberhasilan visi dan misi dalam menyelenggarakan tugas Manajemen Mutu, sebagaimana telah ditetapkan total ukur berserta target kinerja per tahun yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK). Berdasarkan target yang telah ditetapkan, kemudian disusun rencana aksi pencapaian kinerja secara berjenjang dan dilakukan pengukuran secara berkala sebagai bagian dari proses pengendalian pelaksanaan pembangunan. Potret kinerja Pusat Manajemen Mutu pada tahun 2025 sudah baik, hal ini tercermin dari capaian 2 sasaran strategis dengan 13 indikator kinerja utama (IKU) yang memiliki nilai Pencapaian Sasaran Strategis sebesar 114,35%. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) merupakan gambaran nilai kinerja suatu organisasi secara keseluruhan.

Capaian kinerja Pusat Manajemen Mutu pada triwulan I tahun 2026 seperti pada gambar Dashboard berikut ini:



Gambar 5. Capaian Kinerja Pusat Manajemen Mutu pada Triwulan I Tahun 2026



| SASARAN KEGIATAN |                                                                                                                           | INDIKATOR KINERJA |                                                                                                                | TARGET<br>TW I | REALISASI<br>TW I | %      |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------|
| SK.1             | Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang Konsisten Sesuai Standar | 1                 | Harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dengan negara tujuan ekspor                       | 2,00           | 3,00              | 150%   |
|                  |                                                                                                                           | 2                 | Presentase penanganan kasus mutu ekspor produk perikanan yang diselesaikan                                     | 0,00           | 0,00              |        |
|                  |                                                                                                                           | 3                 | Persentase tindak lanjut rekomendasi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan   | 0,00           | 0,00              |        |
|                  |                                                                                                                           | 4                 | Dokumen standar sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan hulu hilir                                    | 0,00           | 0,00              |        |
|                  |                                                                                                                           | 5                 | Persentase unit usaha/lembaga yang menerapkan SJMKHP (QA) sesuai standar dan regulasi                          | 0,00           | 0,00              |        |
|                  |                                                                                                                           | 6                 | Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium                                                    | 76,00          | 81,86             | 107,72 |
|                  |                                                                                                                           | 7                 | Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi                                                | 76,00          | 83,26             | 109,55 |
| SK.2             | Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup Pusat Manajemen Mutu                                                           | 8                 | Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Pusat Manajemen Mutu | 85,00          | 100,00            | 100    |
|                  |                                                                                                                           | 9                 | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran(IKPA) lingkup Pusat Manajemen Mutu                                | 0,00           | 0,00              |        |
|                  |                                                                                                                           | 10                | Indeks profesionalitas ASN lingkup Pusat Manajemen Mutu                                                        | 0,00           | 0,00              |        |
|                  |                                                                                                                           | 11                | Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Pusat Manajemen Mutu                                                     | 0,00           | 0,00              |        |
|                  |                                                                                                                           | 12                | Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Pusat Manajemen Mutu                                                | 0,00           | 0,00              |        |
|                  |                                                                                                                           | 13                | Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Pusat Manajemen Mutu                                                | 0,00           | 0,00              |        |

Tabel 1. Tabel Ikhtisar Pencapaian Kinerja Pusat Manajemen Mutu TW 1 Tahun 2026

### 3.2. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Elaborasi capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis secara lebih detil menurut indikator kinerjanya serta dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra BKIPM sesuai Permen PAN 53 Tahun 2014 dijelaskan sebagai berikut.

### **Sasaran Strategis 1**

**Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang Konsisten Sesuai Standar**

#### **IKU 1. HARMONISASI SISTEM JAMINAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN DENGAN NEGARA TUJUAN EKSPOR**

Pada Triwulan I Tahun 2026, capaian indikator Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dengan Negara Tujuan Ekspor terealisasi sebesar 3 dokumen dari target 2 dokumen atau mencapai 150%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan telah berjalan efektif serta mendukung penguatan pengakuan internasional terhadap sistem official control Indonesia.

Capaian indikator diperoleh melalui penyampaian beberapa dokumen strategis kepada otoritas kompeten negara mitra dan organisasi internasional, yaitu:

1. Penyampaian *Follow-up on Indonesia's Request to be Listed as an Authorized Third Country for Products of Animal Origin* kepada Uni Eropa;
2. Penyampaian Kuisioner Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Indonesia kepada DIPOA Brazil; dan
3. Penyampaian *National Residue Monitoring Plan (NRMP)* Tahun 2026 kepada Uni Eropa.

Pencapaian indikator yang melampaui target dipengaruhi oleh percepatan penyelesaian dokumen harmonisasi prioritas, penguatan koordinasi lintas unit, serta optimalisasi komunikasi teknis dengan otoritas kompeten negara mitra. Selain itu, pelaksanaan monitoring secara berkala terhadap timeline penyusunan dan penyampaian dokumen turut mendukung efektivitas pencapaian target pada Triwulan I Tahun 2026.

Pelaksanaan harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan memiliki nilai strategis dalam mendukung keberlanjutan akses pasar ekspor produk perikanan Indonesia. Penyampaian dokumen harmonisasi tersebut menjadi bagian penting dalam proses pemenuhan persyaratan negara tujuan ekspor serta mendukung peningkatan kepercayaan negara mitra terhadap sistem pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Indonesia.

Selain itu, harmonisasi sistem jaminan mutu juga mendukung penguatan posisi Indonesia dalam perdagangan internasional melalui peningkatan kesesuaian standar mutu, penguatan pengakuan terhadap sistem official control Indonesia, serta percepatan proses registrasi Unit Pengolahan Ikan (UPI) pada negara tujuan ekspor.

Dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian, antara lain adanya perbedaan persyaratan teknis antarnegara tujuan ekspor, perubahan regulasi negara mitra yang bersifat dinamis, serta perlunya percepatan penyediaan data dukung teknis lintas unit dalam proses harmonisasi.

Meskipun demikian, pelaksanaan koordinasi secara intensif, optimalisasi komunikasi teknis lintas unit, serta penguatan monitoring penyelesaian dokumen mampu mendukung efektivitas pelaksanaan kegiatan dan percepatan pencapaian target indikator pada Triwulan I Tahun 2026.

Sebagai langkah tindak lanjut, Pusat Manajemen Mutu akan terus memperkuat harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan melalui percepatan penyelesaian dokumen teknis prioritas, peningkatan koordinasi dengan otoritas kompeten negara mitra, serta penguatan kesiapan sistem pengendalian mutu nasional guna mendukung daya saing dan keberlanjutan ekspor produk perikanan Indonesia di pasar internasional.

Selain itu, harmonisasi sistem jaminan mutu juga mendukung penguatan posisi Indonesia dalam perdagangan internasional melalui peningkatan kesesuaian standar mutu, penguatan pengakuan terhadap sistem official control Indonesia, serta percepatan proses registrasi Unit Pengolahan Ikan (UPI) pada negara tujuan ekspor.

Dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian, antara lain adanya perbedaan persyaratan teknis antarnegara tujuan ekspor, perubahan regulasi negara mitra yang bersifat dinamis, serta perlunya percepatan penyediaan data dukung teknis lintas unit dalam proses harmonisasi.

Meskipun demikian, pelaksanaan koordinasi secara intensif, optimalisasi komunikasi teknis lintas unit, serta penguatan monitoring penyelesaian dokumen mampu mendukung efektivitas pelaksanaan kegiatan dan percepatan pencapaian target indikator pada Triwulan I Tahun 2026.

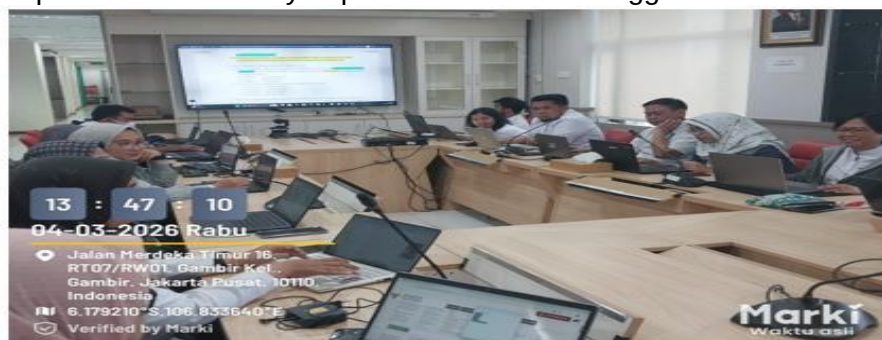
Sebagai langkah tindak lanjut, Pusat Manajemen Mutu akan terus memperkuat harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan melalui percepatan penyelesaian dokumen teknis prioritas, peningkatan koordinasi dengan otoritas kompeten negara mitra, serta penguatan kesiapan sistem pengendalian mutu nasional guna mendukung daya saing dan keberlanjutan ekspor produk perikanan Indonesia di pasar internasional.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung indikator kinerja ini yaitu:

1. Rapat pembahasan penyampaian perkembangan AMR tanggal 27 Februari 2026



2. Rapat Draft Surat Penyampaian NRMP 2026 tanggal 4 Maret 2026





| SP. 1 | Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang Konsisten Sesuai Standar |      |      |                        |                           |                                         |                           |                                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| IK. 1 | Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dengan Negara Tujuan Ekspor                                  |      |      |                        |                           |                                         |                           |                                 |
| 2022  | 2023                                                                                                                      | 2024 | 2025 | Target<br>TW I<br>2026 | Realisasi<br>TW I<br>2026 | %<br>Realisasi<br>thd<br>Target<br>2026 | Target<br>Renstra<br>2026 | % Capaian thd Target<br>Renstra |
|       |                                                                                                                           |      | 8    | 2                      | 3                         | 150%                                    | 8                         | 3                               |

Tabel 4. Pencapaian IKU 1

Capaian indikator Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dengan Negara Tujuan Ekspor pada Triwulan I Tahun 2026 mencapai 150%, yaitu realisasi sebesar 3 dokumen dari target 2 dokumen. Capaian yang melampaui target tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan berjalan lebih efektif dibandingkan rencana awal yang telah ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian indikator dipengaruhi oleh percepatan penyelesaian dokumen harmonisasi prioritas yang memiliki urgensi tinggi terhadap keberlanjutan akses pasar ekspor produk perikanan Indonesia. Selain itu, penguatan koordinasi lintas unit, optimalisasi monitoring penyusunan dokumen, serta respons cepat terhadap permintaan dan persyaratan negara mitra turut mendukung percepatan pencapaian target kinerja pada Triwulan I Tahun 2026.

Tercapainya capaian sebesar 150% juga menunjukkan meningkatnya efektivitas pelaksanaan fungsi harmonisasi dalam mendukung pengakuan sistem official control Indonesia oleh negara tujuan ekspor. Penyampaian dokumen strategis kepada Uni Eropa dan Brazil menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan kerja sama perdagangan internasional serta memperkuat kepercayaan negara mitra terhadap sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan Indonesia.

Dari aspek tata kelola kinerja, capaian yang melampaui target mencerminkan adanya peningkatan efektivitas pengendalian pelaksanaan kegiatan, percepatan proses koordinasi teknis, serta optimalisasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal. Selain itu, pelaksanaan koordinasi secara hybrid dan optimalisasi komunikasi teknis lintas unit turut mendukung efisiensi proses penyelesaian dokumen harmonisasi tanpa mengurangi kualitas substansi dokumen yang disampaikan.

Meskipun capaian indikator telah melampaui target, pelaksanaan harmonisasi sistem jaminan mutu masih menghadapi tantangan berupa dinamika perubahan regulasi negara tujuan ekspor, perbedaan persyaratan teknis antarnegara mitra, serta kebutuhan percepatan penyediaan data dukung teknis lintas unit. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi, peningkatan responsivitas penyelesaian dokumen, dan penguatan monitoring tindak lanjut guna menjaga keberlanjutan capaian kinerja pada triwulan berikutnya.

Ke depan, Pusat Manajemen Mutu akan terus memperkuat strategi harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan melalui peningkatan efektivitas koordinasi teknis, percepatan penyelesaian dokumen prioritas, serta penguatan pengendalian internal guna mendukung daya saing dan keberlanjutan ekspor produk perikanan Indonesia di pasar internasional.



## IKU 6. NILAI KUALITAS PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN MUTU LABORATORIUM

Pada Triwulan I Tahun 2026, nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium mencapai 81,86 dari target sebesar 76 atau sebesar 107,72%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium berbasis SNI ISO/IEC 17025:2017 pada UPT BPPMHKP telah berjalan secara efektif dan konsisten.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh pelaksanaan verifikasi penerapan sistem manajemen mutu laboratorium secara berkala melalui metode onsite verification maupun remote verification. Selain itu, penyusunan program verifikasi, ketersediaan instrumen penilaian, serta pelaksanaan sosialisasi kepada UPT menjadi faktor pendukung dalam meningkatkan kesiapan laboratorium menghadapi proses verifikasi.

Pelaksanaan verifikasi pada 11 laboratorium menunjukkan sebagian besar UPT telah mampu memenuhi persyaratan teknis dan manajemen sesuai standar SNI ISO/IEC 17025:2017. Nilai tinggi yang diperoleh beberapa UPT menunjukkan meningkatnya komitmen terhadap pengendalian mutu hasil pengujian, kompetensi personel, validitas metode uji, serta pengendalian dokumen dan rekaman mutu laboratorium.

Penerapan metode remote verification juga memberikan kontribusi terhadap efektivitas pelaksanaan kegiatan melalui optimalisasi waktu dan efisiensi biaya tanpa mengurangi kualitas proses verifikasi. Kondisi ini mendukung peningkatan kinerja organisasi meskipun realisasi anggaran pada Triwulan I masih relatif rendah.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam penerapan sistem manajemen mutu laboratorium, antara lain belum meratanya pemahaman personel terhadap implementasi klausul teknis, perbedaan tingkat kesiapan sarana prasarana laboratorium, serta perlunya peningkatan konsistensi tindak lanjut atas hasil verifikasi sebelumnya.

Sebagai langkah perbaikan, Pusat Manajemen Mutu akan memperkuat monitoring tindak lanjut hasil verifikasi, meningkatkan pembinaan teknis kepada laboratorium, serta mendorong penguatan kompetensi personel laboratorium guna menjaga konsistensi penerapan sistem manajemen mutu secara berkelanjutan

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium, Tim kerja Sistem Manajemen Mutu Pusat Manajemen Mutu telah melakukan kegiatan persiapan sebelum dilakukannya verifikasi penilaian penerapan sistem manajemen mutu laboratorium, diantaranya adalah:

1. Penyusunan prosedur verifikasi penerapan sistem manajemen mutu laboratorium (termasuk kegiatan *on site verification* dan/atau *remote verification*)
2. Penyusunan kuesioner/ceklist verifikasi penerapan sistem manajemen mutu laboratorium
3. Penyusunan program verifikasi penerapan sistem manajemen mutu laboratorium tahun 2026
4. Sosialisasi kegiatan verifikasi penerapan sistem manajemen mutu laboratorium tahun 2026



Pada Triwulan I Ke tahun 2026 Pelaksanaan verifikasi penerapan sistem manajemen mutu laboratorium. Pada triwulan I tahun 2026 telah dilaksanakan verifikasi penerapan sistem manajemen mutu laboratorium di 11 laboratorium UPT BPPMHKP, yaitu UPT BPPMHKP Medan I, UPT BPPMHKP Surabaya I, UPT BPPMHKP Palu, UPT BPPMHKP Batam, UPT BPPMHKP Jayapura, UPT BPPMHKP Banjarbaru, UPT BPPMHKP Medan II, UPT BPPMHKP Palangkaraya, UPT BPPMHKP Tarakan, UPT BPPMHKP Aceh, UPT BPPMHKP Tanjung Pinang.

1. Hasil verifikasi penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pada UPT BPPMHKP Medan I pada tanggal 21 Januari 2026 dengan metode *remote verification* mendapatkan nilai 77,63.
2. Hasil verifikasi penerapan sistem manajemen mutu laboratorium di UPT BPPMHKP Surabaya I pada tanggal 22 Januari 2026 dengan metode *remote verification* mendapatkan nilai 76,19.
3. Hasil verifikasi penerapan sistem manajemen mutu laboratorium di UPT BPPMHKP Palu pada tanggal 27-30 Januari 2026 dengan metode *Onsite* mendapatkan nilai 81,53.
4. Hasil verifikasi penerapan sistem manajemen mutu laboratorium di UPT BPPMHKP Batam pada tanggal 27-30 Januari 2026 dengan metode *Onsite* mendapatkan nilai 80,70.
5. Hasil verifikasi penerapan sistem manajemen mutu laboratorium di UPT BPPMHKP Jayapura pada tanggal 28 Januari 2026 dengan metode *remote verification* mendapatkan nilai 76,71.
6. Hasil verifikasi penerapan sistem manajemen mutu laboratorium di UPT BPPMHKP Banjarbaru pada tanggal 3-6 Februari 2026 dengan metode *Onsite* mendapatkan nilai 98,21.
7. Hasil verifikasi penerapan sistem manajemen mutu laboratorium di UPT BPPMHKP Medan II pada tanggal 10 Februari 2026 dengan metode *remote verification* mendapatkan nilai 83,68.
8. Hasil verifikasi penerapan sistem manajemen mutu laboratorium di UPT BPPMHKP Palangkaraya pada tanggal 11 Februari 2026 dengan metode *remote verification* mendapatkan nilai 78,24.
9. Hasil verifikasi penerapan sistem manajemen mutu laboratorium di UPT BPPMHKP Tarakan pada tanggal 4 Februari 2026 dengan metode *remote verification* mendapatkan nilai 80,13.
10. Hasil verifikasi penerapan sistem manajemen mutu laboratorium di UPT BPPMHKP Aceh pada tanggal 2-4 Maret 2026 dengan metode *onsite* mendapatkan nilai 91,50.
11. Hasil verifikasi penerapan sistem manajemen mutu laboratorium di UPT BPPMHKP Tanjung Pinang pada tanggal 2-4 Maret 2026 dengan metode *onsite* mendapatkan nilai 86,04.

Berdasarkan hasil verifikasi, nilai realisasi kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium triwulan I tahun 2026 sebesar 81,87. Target nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium tahun 2026 adalah 76. Berdasarkan perbandingan nilai realisasi dengan nilai target, maka nilai realisasi sebesar 107,72%

| IK. 6 Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium |      |      |      |                  |                     |                             |                     |                              |
|-------------------------------------------------------------------|------|------|------|------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------------|
| 2022                                                              | 2023 | 2024 | 2025 | Target TW I 2026 | Realisasi TW I 2026 | % Realisasi thd Target 2026 | Target Renstra 2026 | % Capaian thd Target Renstra |
|                                                                   |      |      | 75   | 76               | 81,86               | 107,72                      | 75                  | 76                           |

Tabel 9. Pencapaian IKU 6

Seperti pada tabel capaian indikator kinerja Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang Konsisten Sesuai Standar



## IKU 7. NILAI KUALITAS PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN MUTU LEMBAGA INSPEKSI

Pengendalian (official control) yang dilaksanakan oleh unit kerja terkait harus sesuai dengan peraturan atau persyaratan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan sistem pengendalian (official control) sesuai dengan pendelegasian kewenangan yang diberikan Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan selaku Otoritas Kompeten yang diamanahkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.8 Tahun 2024 yaitu untuk melakukan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan regulasi dan standar yang berlaku secara nasional maupun internasional. Dalam rangka pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dilakukan melalui inspeksi atau surveilan ke pelaku usaha, untuk menjamin pelaksanaan inspeksi dan surveilan dilaksanakan sesuai regulasi dan memenuhi kaidah ketidakberpihakan, kerahasiaan, dan berintegritas. UPT BPPMHKP menerapkan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi berdasarkan SNI ISO/IEC 17020:2012, Oleh karena itu, untuk menyiapkan dan memastikan pelaksanaan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi sesuai dengan standar, maka perlu dilakukan verifikasi atau verifikasi penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi.

Lembaga inspeksi adalah lembaga yang ditetapkan untuk melakukan kegiatan pengendalian dan pengawasan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan melalui inspeksi/surveilan. Dalam memastikan pelaksanaan Lembaga inspeksi yang memenuhi azas ketidakberpihakan serta konsistensi maka menerapkan sistem manajemen mutu Lembaga inspeksi berdasarkan SNI ISO 17020:2012. Oleh karena itu, perlu dilakukan penilaian kualitas penerapan sistem manajemen mutu Lembaga inspeksi berdasarkan penilaian pemenuhan klausul SNI ISO/IEC 17020:2012 yang terverifikasi. Adapun tanggungjawab kegiatan ini adalah Ketua Tim Kerja Sistem Manajemen Mutu.

Pelaksanaan verifikasi penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi. Pada triwulan I tahun 2026 telah dilaksanakan verifikasi penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi di 10 UPT BPPMHKP, yaitu UPT BPPMHKP Jambi, UPT BPPMHKP Medan I, UPT BPPMHKP Palu, UPT BPPMHKP Batam, UPT BPPMHKP Banjarbaru, UPT BPPMHKP Ternate, UPT BPPMHKP Tarakan, UPT BPPMHKP Aceh, UPT BPPMHKP Tanjung Pinang, dan UPT BPPMHKP Surabaya II

1. Hasil verifikasi penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi pada UPT BPPMHKP Jambi pada tanggal 21 Januari 2026 dengan metode *remote verification* mendapatkan nilai 77,22.
2. Hasil verifikasi penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi pada UPT BPPMHKP Medan I pada tanggal 21 Januari 2026 dengan metode *remote verification* mendapatkan nilai 76,40.
3. Hasil verifikasi penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi pada UPT BPPMHKP Palu pada tanggal 27-30 Januari 2026 dengan metode *Onsite* mendapatkan nilai 81,21.
4. Hasil verifikasi penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi pada UPT BPPMHKP Batam pada tanggal 27-30 Januari 2026 dengan metode *Onsite* mendapatkan nilai 83,63.
5. Hasil verifikasi penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi pada UPT BPPMHKP Banjarbaru pada tanggal 3-6 Februari 2026 dengan metode *Onsite* mendapatkan nilai 97,57.

6. Hasil verifikasi penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi pada UPT BPPMHKP Ternate pada tanggal 5 Februari 2026 dengan metode *remote verification* mendapatkan nilai 78,00.
7. Hasil verifikasi penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi pada UPT BPPMHKP Tarakan pada tanggal 10 Februari 2026 dengan metode *remote verification* mendapatkan nilai 76,84.
8. Hasil verifikasi penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi pada UPT BPPMHKP Aceh pada tanggal 2-5 Maret 2026 dengan metode *onsite* mendapatkan nilai 84,20.
9. Hasil verifikasi penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi pada UPT BPPMHKP Tanjung Pinang pada tanggal 2-4 Maret 2026 dengan metode *onsite* mendapatkan nilai 84,28.
10. Hasil verifikasi penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi pada UPT BPPMHKP Surabaya II pada tanggal 4-6 Maret 2026 dengan metode *Onsite* mendapatkan nilai 93,20.

Berdasarkan hasil verifikasi, nilai realisasi kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi triwulan I tahun 2026 sebesar 83,26. Target nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium tahun 2026 adalah 76. Berdasarkan perbandingan nilai realisasi dengan nilai target, maka nilai realisasi sebesar 109,55%.

| SP. 1 Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang Konsisten Sesuai Standar |      |      |      |                  |                     |                             |                     |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------------|
| IK. 7 Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi                                                           |      |      |      |                  |                     |                             |                     |                              |
| 2022                                                                                                                            | 2023 | 2024 | 2025 | Target TW I 2026 | Realisasi TW I 2026 | % Realisasi thd Target 2026 | Target Renstra 2026 | % Capaian thd Target Renstra |
|                                                                                                                                 |      |      | 75   | 76               | 83,26               | 109,55                      | 75                  |                              |

Tabel 10. Pencapaian IKU 7

## Lampiran 2 .Formulasi perhitungan capaian IK

Rata-rata nilai kualitas pemenuhan klausul dalam ISO 17025 yang terverifikasi

$$X = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n}$$

Keterangan:

$X$  : Rata-rata

$x_1+x_2+x_3+\dots+x_n$  : Nilai kualitas pemenuhan ke - 1, 2, 3,..., n

Banyaknya nilai kualitas pemenuhan

**Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi : 83,26**

Seperti pada tabel capaian indikator kinerja Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang Konsisten Sesuai Standar diatas dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja TW 1 2026 sebesar 76, Persentase realisasi capaian indikator TW 1 tahun 2026 sebesar 83,26% terhadap capaian pada TW 1 tahun 2026

| No.                    | Unit Kerja                 | Nilai        |
|------------------------|----------------------------|--------------|
| 1                      | UPT BPPMHKP Jambi          | 77,22        |
| 2                      | UPT BPPMHKP Medan I        | 76,40        |
| 3                      | UPT BPPMHKP Palu           | 81,21        |
| 4                      | UPT BPPMHKP Batam          | 83,63        |
| 5                      | UPT BPPMHKP Banjarbaru     | 97,57        |
| 6                      | UPT BPPMHKP Ternate        | 78,00        |
| 7                      | UPT BPPMHKP Tarakan        | 76,84        |
| 8                      | UPT BPPMHKP Aceh           | 84,20        |
| 9                      | UPT BPPMHKP Tanjung Pinang | 84,28        |
| 10                     | UPT BPPMHKP Surabaya II    | 93,20        |
| <b>Nilai Rata-Rata</b> |                            | <b>83,26</b> |

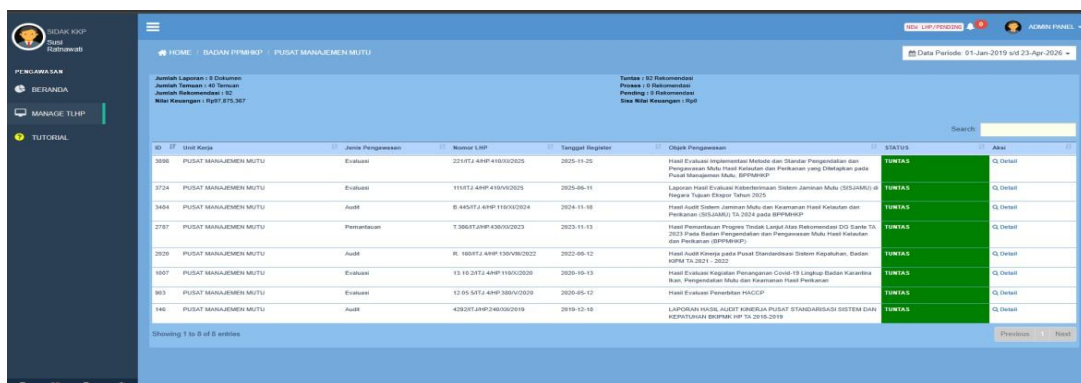


## Sasaran Strategis 2

### Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincah dan Akuntabel Dalam Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

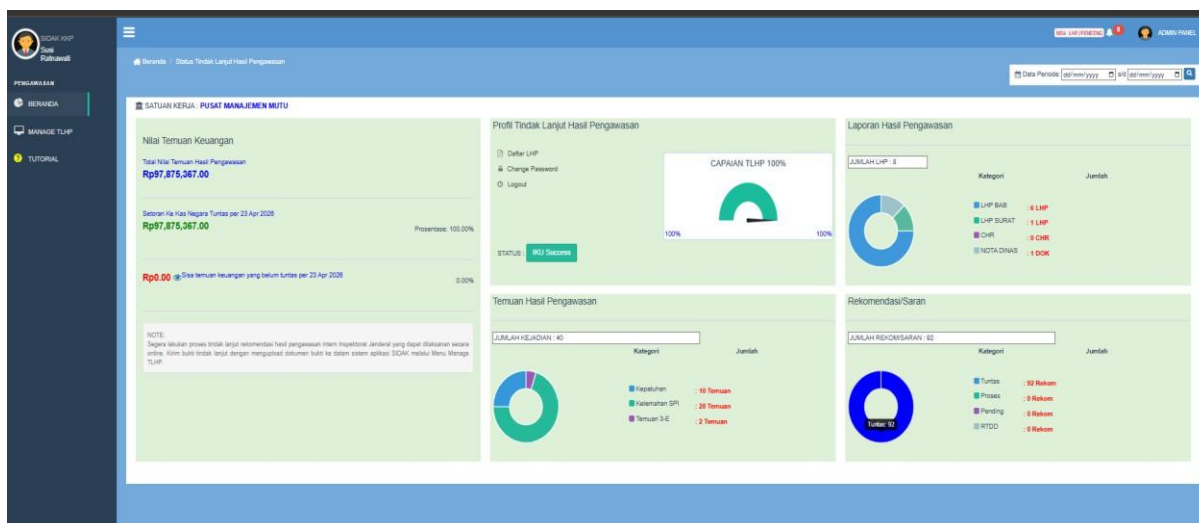
#### IKU 8. PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN YANG DIMANFAATKAN UNTUK PERBAIKAN KINERJA LINGKUP PUSAT MANAJEMEN MUTU

Pada Triwulan I Tahun 2026, persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja mencapai 100% dari target sebesar 85%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh rekomendasi hasil pengawasan telah ditindaklanjuti dan dimanfaatkan sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola organisasi serta peningkatan akuntabilitas kinerja. Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh komitmen pimpinan dan seluruh unit kerja dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP secara tepat waktu dan berkelanjutan. Selain itu, koordinasi internal yang baik serta pelaksanaan monitoring tindak lanjut secara berkala menjadi faktor utama dalam memastikan penyelesaian rekomendasi pengawasan. Pemanfaatan rekomendasi hasil pengawasan tidak hanya difokuskan pada penyelesaian administratif, tetapi juga diarahkan pada perbaikan sistem kerja, penguatan pengendalian internal, peningkatan kepatuhan terhadap regulasi, serta penyempurnaan pelaksanaan kegiatan organisasi. Capaian ini menunjukkan meningkatnya budaya akuntabilitas dan komitmen organisasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Selain itu, tindak lanjut hasil pengawasan secara optimal turut mendukung upaya mitigasi risiko terhadap potensi temuan berulang pada periode berikutnya. Meskipun seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti, masih diperlukan penguatan monitoring atas efektivitas implementasi hasil tindak lanjut agar perbaikan yang dilakukan dapat berjalan secara konsisten dan berkelanjutan. Sebagai langkah perbaikan ke depan, Pusat Manajemen Mutu akan meningkatkan pengendalian internal, memperkuat monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi pengawasan, serta memastikan setiap hasil pengawasan menjadi bagian dari proses perbaikan organisasi secara berkelanjutan. Dalam proses pemantauan/penilaian terhadap bukti pendukung tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP nomor: 221/ITJ.4/HP.410/XI/2025, perihal Hasil Evaluasi Implementasi Metode dan Standar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan pada Pusat Manajemen Mutu, BPPMHKP sesuai dengan Surat Tugas Nomor: B.625/ITJ.4/KP.440/XII/2025, diperoleh hasil sebagaimana tertuang



| ID   | Jenis Pengawasan     | Revisi      | Tanggal Diterima             | Detail Pengawasan                                                                                                                                               | Status | Aksi      |
|------|----------------------|-------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 3658 | PUSAT MANAJEMEN MUTU | Evaluasi    | 221/ITJ.4/HP.410/XI/2025     | Hasil Evaluasi Implementasi Metode dan Standar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan pada Pusat Manajemen Mutu, BPPMHKP | TUNTAS | CI Detail |
| 3724 | PUSAT MANAJEMEN MUTU | Evaluasi    | 11/ITJ.4/HP.410/XI/2025      | Laporan Hasil Evaluasi Keterlaksanaan Sistem Jaminan Mutu (SELJAMU) di Tingkat Satuan Kerja Tahun 2025                                                          | TUNTAS | CI Detail |
| 3454 | PUSAT MANAJEMEN MUTU | Audit       | B.440/ITJ.4/HP.110/XI/2024   | Hasil Audit Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan (SELJAMU) TA 2024 pada BPPMHKP                                                        | TUNTAS | CI Detail |
| 2787 | PUSAT MANAJEMEN MUTU | Pemeriksaan | 1.360/ITJ.4/HP.410/XI/2023   | Hasil Pemeriksaan Program Tindak Lanjut Atas Rekomendasi DQ Survei TA 2023 Pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP)   | TUNTAS | CI Detail |
| 2020 | PUSAT MANAJEMEN MUTU | Audit       | B.180/ITJ.4/HP.130/XI/2022   | Hasil Audit Komitansi pada Pusat Standardisasi Sistem Kepatuhan, Badan KKP TA 2021 - 2022                                                                       | TUNTAS | CI Detail |
| 1007 | PUSAT MANAJEMEN MUTU | Evaluasi    | 13.15.2/ITJ.4/HP.110/XI/2020 | Hasil Evaluasi Kegiatan Penanganan Covid-19 Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan                                        | TUNTAS | CI Detail |
| 983  | PUSAT MANAJEMEN MUTU | Evaluasi    | 12.05.5/ITJ.4/HP.380/XI/2020 | Hasil Evaluasi Pemantauan HACCP                                                                                                                                 | TUNTAS | CI Detail |
| 146  | PUSAT MANAJEMEN MUTU | Audit       | 420/ITJ.4/HP.410/XI/2019     | 6.1/PORTAL WILDA, AUDIT KINERJA PUSAT STANDARDISASI SISTEM DAN KEPATUHAN (DSM) HP TA 2018-2019                                                                  | TUNTAS | CI Detail |

Gambar 6. Capaian tindak lanjut hasil pengawasan 2026



Gambar 7. Capaian tindaklanjuti hasil pengawasan 2026

### Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPPMHKP

**Definisi :**  
Jumlah rekomendasi hasil pengawasan ltjen yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh seluruh unit Eselon I lingkup KKP sampai dengan waktu pengukuran.

**Formula Perhitungan :**

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi ltjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja}} \times 100\%$$

|                        |                                                                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Satuan Pengukuran      | : Persen                                                                    |
| Tingkat Validitas IK   | : ( ) Output Tk. Kendali Tinggi ( X ) Output Tk. Kendali Rendah ( ) Outcome |
| Sumber Data            | : Inspektorat Jenderal                                                      |
| Jenis Perhitungan Data | : ( ) Akumulasi ( X ) Rata-rata ( ) Nilai Posisi Akhir                      |
| Metode Cascading       | : ( X ) Direct ( ) Non Direct                                               |
| Polarisasi             | : ( X ) Maximize ( ) Minimize ( ) Stabilize                                 |
| Periode Pelaporan      | : ( ) Bulanan ( X ) Triwulanan ( ) Semesteran ( ) Tahunan                   |

Gambar 8. Formulasi Perhitungan Capaian IK Pengawasan

|       |                                                                                                                                        |      |      |                  |                     |                             |                     |                              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------------|
| SP. 2 | Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincah dan Akuntabel Dalam Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan |      |      |                  |                     |                             |                     |                              |
| IK. 8 | Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Pusat Manajemen Mutu                         |      |      |                  |                     |                             |                     |                              |
| 2022  | 2023                                                                                                                                   | 2024 | 2025 | Target TW I 2026 | Realisasi TW I 2026 | % Realisasi thd Target 2026 | Target Renstra 2026 | % Capaian thd Target Renstra |
|       |                                                                                                                                        |      | 85   | 86               | 100                 | 100%                        | 85                  |                              |

Tabel.4 capaian IKU 8



Capaian sebesar 100% mencerminkan meningkatnya budaya akuntabilitas dan komitmen organisasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Selain itu, optimalisasi tindak lanjut hasil pengawasan turut mendukung mitigasi risiko terhadap potensi temuan berulang pada periode berikutnya. Meskipun seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti, penguatan monitoring terhadap efektivitas implementasi hasil tindak lanjut masih perlu dilakukan guna memastikan bahwa setiap rekomendasi benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas tata kelola organisasi.

Sebagai langkah perbaikan ke depan, Pusat Manajemen Mutu akan memperkuat pengendalian internal, meningkatkan efektivitas monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan, serta memastikan setiap hasil pengawasan menjadi bagian dari proses perbaikan organisasi secara berkelanjutan.

## **REALISASI ANGGARAN**

Realisasi anggaran Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah diarahkan secara fokus pada aktivitas prioritas yang memiliki kontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran strategis organisasi, khususnya dalam penguatan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang memenuhi standar nasional dan internasional.

Sampai dengan akhir Maret 2026, realisasi anggaran Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri mencapai Rp636.470.039 atau sebesar 5,54% dari total pagu Rp11.490.100.000. Meskipun tingkat serapan anggaran secara keseluruhan masih relatif rendah pada triwulan awal, beberapa kegiatan strategis telah menunjukkan progres pelaksanaan yang sangat baik dan efektif dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi. Hal tersebut tercermin pada kegiatan Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang telah mencapai realisasi sebesar 85,65%, Penguatan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Penguji sebesar 78,48%, serta Verifikasi Penerapan Standar Quality Assurance yang mencapai 97,83%. Tingginya capaian pada kegiatan tersebut menunjukkan bahwa organisasi telah memprioritaskan pelaksanaan aktivitas yang memiliki dampak langsung terhadap penguatan compliance system, peningkatan kredibilitas laboratorium penguji, serta penguatan pengawasan mutu produk perikanan nasional.

Sementara itu, beberapa kegiatan dengan alokasi anggaran besar, seperti peningkatan kompetensi inspektur mutu, penguatan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi, monitoring traceability, dan pelaksanaan Bulan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, masih berada pada tahap persiapan administrasi, finalisasi jadwal pelaksanaan, koordinasi lintas unit, serta proses pengadaan dan penyesuaian teknis pelaksanaan kegiatan. Kondisi tersebut mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran secara agregat pada Triwulan I.

Dari sisi kualitas belanja, pengelolaan anggaran telah dilaksanakan secara selektif dan berbasis prioritas dengan tetap memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Organisasi tidak hanya berorientasi pada percepatan serapan, tetapi juga memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas sistem jaminan mutu nasional, penguatan official control, harmonisasi standar mutu ekspor, serta peningkatan daya saing produk kelautan dan perikanan Indonesia di pasar global.



Sebagai langkah tindak lanjut, organisasi akan melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan pada triwulan berikutnya melalui penguatan monitoring realisasi anggaran, optimalisasi rencana penarikan dana, percepatan pengadaan barang dan jasa, serta pengendalian pelaksanaan kegiatan berbasis target output dan outcome guna menjaga konsistensi capaian kinerja dan kualitas pelaksanaan program sampai akhir tahun anggaran.

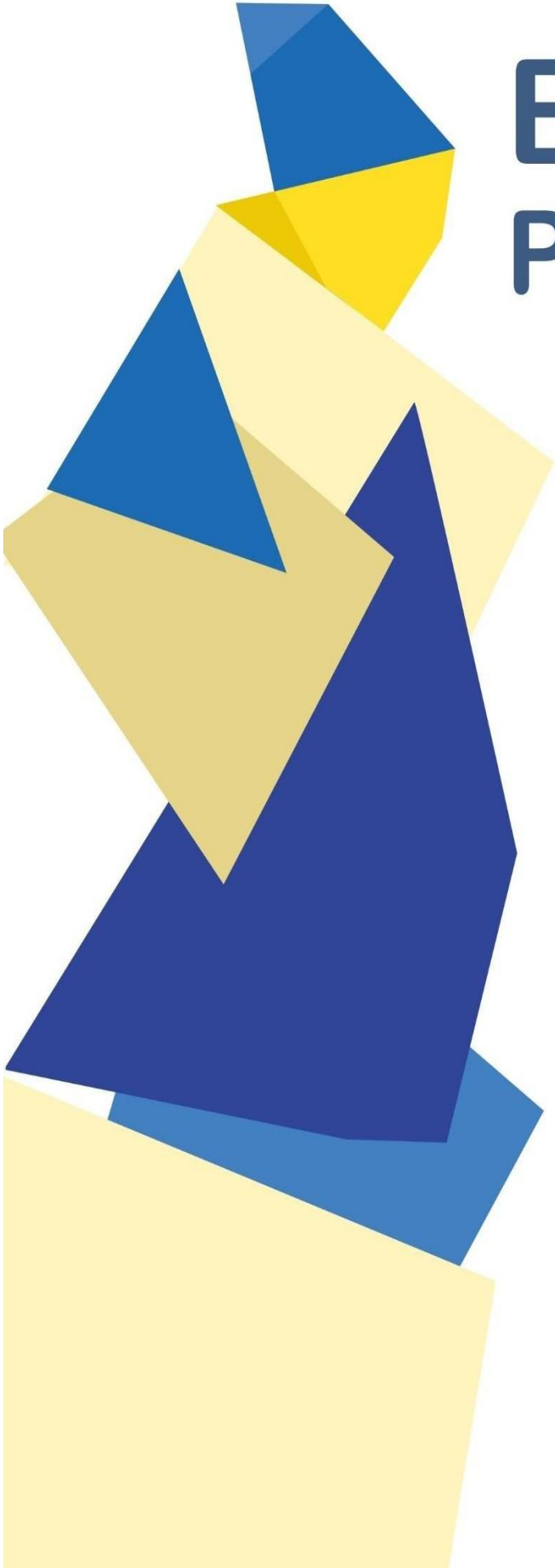
## **Efisiensi**

Efisiensi penggunaan anggaran pada Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan bahwa organisasi telah mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efektif dalam mendukung pencapaian sasaran strategis. Meskipun realisasi anggaran Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri baru mencapai 5,54% dari total pagu, sebagian besar indikator kinerja utama tetap menunjukkan capaian yang baik bahkan melampaui target yang ditetapkan.

Kondisi tersebut mencerminkan bahwa pelaksanaan anggaran telah dilakukan secara selektif dan berorientasi pada kegiatan prioritas yang memiliki kontribusi langsung terhadap penguatan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Strategi pengelolaan anggaran difokuskan pada kegiatan yang memberikan dampak signifikan terhadap harmonisasi standar mutu ekspor, penguatan sistem manajemen mutu laboratorium, penerapan quality assurance, serta peningkatan kredibilitas sistem pengawasan mutu nasional. Efisiensi pelaksanaan program terlihat pada beberapa kegiatan strategis yang telah menunjukkan tingkat realisasi tinggi dan berdampak langsung terhadap pencapaian outcome organisasi, antara lain kegiatan Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dengan realisasi sebesar 85,65%, Penguatan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Penguji sebesar 78,48%, serta Verifikasi Penerapan Standar Quality Assurance sebesar 97,83%. Tingginya capaian tersebut menunjukkan bahwa penggunaan anggaran telah diarahkan secara tepat sasaran untuk mendukung peningkatan kepatuhan terhadap standar mutu nasional dan internasional.

Sementara itu, beberapa kegiatan lainnya masih menunjukkan realisasi yang rendah karena pelaksanaannya memerlukan tahapan persiapan teknis, pengadaan barang dan jasa, koordinasi lintas unit, serta penyesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan yang sebagian besar akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya. Oleh karena itu, rendahnya serapan pada awal tahun belum sepenuhnya mencerminkan rendahnya efektivitas pelaksanaan program, melainkan merupakan bagian dari strategi pengendalian pelaksanaan kegiatan agar tetap sesuai dengan prinsip akuntabilitas, kualitas pelaksanaan, dan ketepatan sasaran.

Dalam rangka menjaga efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran pada triwulan berikutnya, organisasi akan terus memperkuat monitoring dan evaluasi realisasi anggaran, percepatan pelaksanaan kegiatan prioritas, optimalisasi rencana penarikan dana, serta pengendalian kinerja berbasis output dan outcome. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga konsistensi capaian kinerja sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola anggaran yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi hasil.



# Bab IV

## Penutup

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja (LKj) Pusat Manajemen Mutu Triwulan I Tahun 2026 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), sekaligus sebagai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berorientasi pada hasil, efektivitas pelaksanaan program, dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan Pusat Manajemen Mutu pada Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan capaian kinerja yang baik. Hal tersebut tercermin dari capaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 114,35% dengan sebagian indikator kinerja telah melampaui target yang ditetapkan pada periode Triwulan I Tahun 2026. Capaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan telah berjalan efektif, khususnya pada aspek harmonisasi sistem jaminan mutu dengan negara tujuan ekspor, peningkatan kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium, peningkatan kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi, serta optimalisasi tindak lanjut hasil pengawasan dalam mendukung perbaikan tata kelola organisasi. Keberhasilan pencapaian kinerja didukung oleh penguatan koordinasi internal, pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala, optimalisasi metode remote verification, serta meningkatnya komitmen unit kerja dalam menjaga konsistensi penerapan sistem manajemen mutu sesuai standar nasional dan internasional.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaan program dan kegiatan masih terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian, antara lain belum optimalnya realisasi anggaran pada Triwulan I, perbedaan tingkat kesiapan implementasi sistem manajemen mutu antar-UPT, serta perlunya peningkatan efektivitas tindak lanjut hasil verifikasi dan pengawasan secara berkelanjutan.

Melalui berbagai langkah perbaikan tersebut, Pusat Manajemen Mutu akan terus memperkuat efektivitas pelaksanaan program, kualitas pengendalian internal, dan konsistensi penerapan sistem manajemen mutu secara berkelanjutan.

Penguatan sistem manajemen mutu laboratorium dan lembaga inspeksi diharapkan mampu meningkatkan kredibilitas sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan Indonesia, memperkuat kepercayaan negara tujuan ekspor, serta mendukung peningkatan daya saing produk perikanan nasional di pasar internasional.

Selain itu, optimalisasi tata kelola dan akuntabilitas kinerja organisasi diharapkan dapat mendukung terwujudnya birokrasi yang efektif, adaptif, dan berorientasi hasil dalam mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.

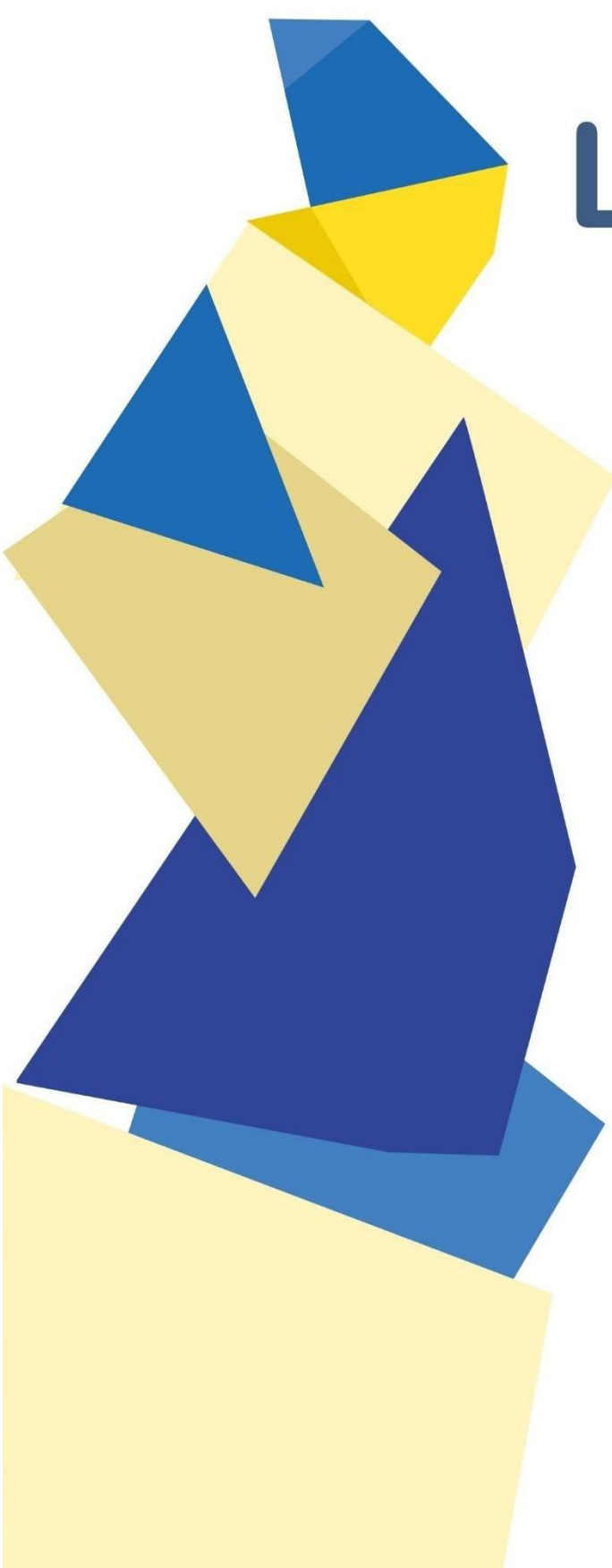


## Kesimpulan

Secara umum rata-rata NPSS pada Triwulan I Tahun 2026 adalah sebesar 114,35,% yang berasal dari 2 IKU (80%) yang pencapaiannya memenuhi target,

## Rekomendasi

1. Laboratorium yang telah diverifikasi penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium SNI ISO/IEC 17025:2017 harus menindaklanjuti rekomendasi dari verifikator.
2. Penyelesaian kuisisioner Rusia dan Amerika Serikat (Siluriformes)
3. Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja secara periodik



# LAMPIRAN



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN  
MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN  
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEFON (021) 3016050 (KACAK), (021) 3813282  
LAMAR [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [info@kpmp.kkp.go.id](mailto:info@kpmp.kkp.go.id)

#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 PUSAT MANAJEMEN MUTU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Woro Nur Endang Sariati  
Jabatan : Kepala Pusat Manajemen Mutu

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ishartini  
Jabatan : Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 5 Januari 2026

Pihak Kedua  
Kepala Badan Pengendalian dan  
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan  
Perikanan



Ishartini

Pihak Pertama  
Kepala Pusat Manajemen Mutu



Woro Nur Endang Sariati

#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 PUSAT MANAJEMEN MUTU

| Batasan Kegiatan |                                                                                                                                        | Indikator Kinerja |                                                                                                                    | Target |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| SK.1             | Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang Konsisten dan Standar                 | 1                 | Harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dengan negara tujuan ekspor (dokumen)                 | 8      |
|                  |                                                                                                                                        | 2                 | Persentase penanganan kasus mutu ekspor produk perikanan yang diselesaikan (%)                                     | 95     |
|                  |                                                                                                                                        | 3                 | Persentase tindak lanjut rekomendasi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan (%)   | 72     |
|                  |                                                                                                                                        | 4                 | Dokumen Standar sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan hulu hilir (dokumen)                              | 4      |
|                  |                                                                                                                                        | 5                 | Persentase unit usaha/lembaga yang menerapkan SJMKHP (QA) Sesuai standar dan regulasi (%)                          | 73     |
|                  |                                                                                                                                        | 6                 | Nilai Kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium (nilai)                                                | 76     |
|                  |                                                                                                                                        | 7                 | Nilai kualitas penerapan system manajemen mutu Lembaga Inspeksi (nilai)                                            | 76     |
| SK.2             | Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan Pengawasan Mutu hasil Kelautan dan Perikanan | 8                 | Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Pusat Manajemen Mutu (%) | 86     |
|                  |                                                                                                                                        | 9                 | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pusat Manajemen Mutu (nilai)                           | 92,10  |
|                  |                                                                                                                                        | 10                | Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pusat Manajemen Mutu (indeks)                                                   | 82,5   |
|                  |                                                                                                                                        | 11                | Nilai penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Pusat Manajemen Mutu (nilai)                                                 | 86,20  |
|                  |                                                                                                                                        | 12                | Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Pusat Manajemen Mutu (%)                                                | 100    |
|                  |                                                                                                                                        | 13                | Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Pusat Manajemen Mutu (nilai)                                            | 71,75  |

Unit:

PUSAT MANAJEMEN MUTU

Tahun:

2025

Tampilkan

TW1



TW2



TW3



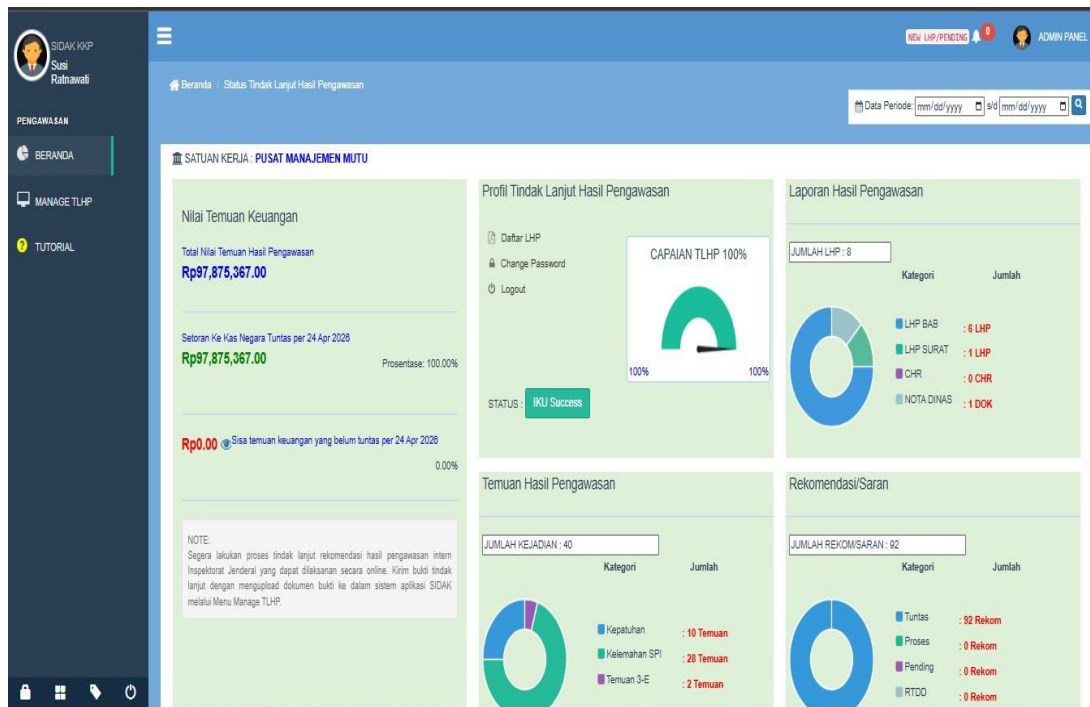
TW4



| Jenis           | TW1    | TW2 | s/d TW2 | TW3 | s/d TW3 | TW4 |
|-----------------|--------|-----|---------|-----|---------|-----|
| Skor Capaian    | 114.35 |     |         |     |         |     |
| Skor Verifikasi | 114.35 |     |         |     |         |     |

Legend

- 110 - 120 (Istimewa)
- 90 - 110 (Baik)
- 70 - 90 (Cukup)
- 50 - 70 (Kurang)
- 0 - 50 (Sangat Kurang)



**SIDAK KKP**  
Susi Ratnawati

NEW LHP/PENDING 8 ADMIN PANEL

HOME / BADAN PPMHKP / PUSAT MANAJEMEN MUTU

Data Periode: 01-Jan-2019 s/d 24-Apr-2026

Jumlah Laporan : 8 Dokumen  
Jumlah Temuan : 40 Temuan  
Jumlah Rekomendasi : 62  
Nilai Keuangan : Rp97,875,367

Tuntas : 62 Rekomendasi  
Proses : 0 Rekomendasi  
Pending : 0 Rekomendasi  
Sisa Nilai Keuangan : Rp0

Search:

| ID   | Unit Kerja           | Jenis Pengawasan | Nomor LHP                     | Tanggal Register | Objek Pengawasan                                                                                                                                                 | STATUS | Aksi      |
|------|----------------------|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 3686 | PUSAT MANAJEMEN MUTU | Evaluasi         | 221/ITJ.4/HP.410/XI/2025      | 2025-11-25       | Hasil Evaluasi Implementasi Metode dan Standar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Keluaran dan Perikanan yang Dihasilkan pada Pusat Manajemen Mutu, BPPM HKP | TUNTAS | Q, Detail |
| 3724 | PUSAT MANAJEMEN MUTU | Evaluasi         | 111/ITJ.4/HP.410/VI/2025      | 2025-06-11       | Laporan Hasil Evaluasi Keberlaksanaan Sistem Jaminan Mutu (SISJAMU) di Negara Tujuan Ekspor Tahun 2025                                                           | TUNTAS | Q, Detail |
| 3484 | PUSAT MANAJEMEN MUTU | Audit            | B.445/ITJ.4/HP.110/XI/2024    | 2024-11-18       | Hasil Audit Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Keluaran dan Perikanan (SISJAMU) TA 2024 pada BPPM HKP                                                        | TUNTAS | Q, Detail |
| 2787 | PUSAT MANAJEMEN MUTU | Pemeriksaan      | T.386/ITJ.4/HP.430/XI/2023    | 2023-11-13       | Hasil Pemeriksaan Progres Tindak Lanjut Atas Rekomendasi DG Sante TA 2023 Pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Keluaran dan Perikanan (BPPM HKP)    | TUNTAS | Q, Detail |
| 2020 | PUSAT MANAJEMEN MUTU | Audit            | R. 160/ITJ.4/HP.130/VIII/2022 | 2022-08-12       | Hasil Audit Kinerja pada Pusat Standardisasi Sistem Kepatuhan, Badan KIPM TA 2021 - 2022                                                                         | TUNTAS | Q, Detail |
| 1007 | PUSAT MANAJEMEN MUTU | Evaluasi         | 13.10.2/ITJ.4/HP.110/X/2020   | 2020-10-13       | Hasil Evaluasi Kegiatan Penanganan Covid-19 Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan                                         | TUNTAS | Q, Detail |
| 903  | PUSAT MANAJEMEN MUTU | Evaluasi         | 12.05.5/ITJ.4/HP.380/X/2020   | 2020-05-12       | Hasil Evaluasi Penerbitan HACCP                                                                                                                                  | TUNTAS | Q, Detail |
| 146  | PUSAT MANAJEMEN MUTU | Audit            | 4292/ITJ.4/HP.240/XII/2019    | 2019-12-18       | LAPORAN HASIL AUDIT KINERJA PUSAT STANDARISASI SISTEM DAN KEPATUHAN BKPMK HP TA 2019/2019                                                                        | TUNTAS | Q, Detail |

Showing 1 to 8 of 8 entries

Previous 1 Next

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2026  
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;  
Periode Maret 2026

Kementerian : 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Unit Organisasi 13 BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Satuan Kerja : 440807 SEKRETARIAT BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

Hal 1 dari 1

| Uraian                                                                        | Pagu Revisi | Lock Pagu  | Realisasi TA 2026 |             |              |         | SISA<br>ANGGARAN |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------|-------------|--------------|---------|------------------|
|                                                                               |             |            | Periode Lalu      | Periode Ini | s.d. Periode | %       |                  |
| JUMLAH SELURUHNYA                                                             | 100,000,000 | 72,766,000 | 25,051,700        | 1,492,500   | 26,544,200   | 26.54 % | 689,800          |
| WAProgram Dukungan Manajemen                                                  | 100,000,000 | 72,766,000 | 25,051,700        | 1,492,500   | 26,544,200   | 26.54 % | 689,800          |
| WA.3987 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan | 100,000,000 | 72,766,000 | 25,051,700        | 1,492,500   | 26,544,200   | 26.54 % | 689,800          |
| Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan                                             | 100,000,000 | 72,766,000 | 25,051,700        | 1,492,500   | 26,544,200   | 26.54 % | 689,800          |
| EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal                                       | 100,000,000 | 72,766,000 | 25,051,700        | 1,492,500   | 26,544,200   | 26.54 % | 689,800          |
| EBA.962 Layanan Umum                                                          | 100,000,000 | 72,766,000 | 25,051,700        | 1,492,500   | 26,544,200   | 26.54 % | 689,800          |
| 051 Layanan Umum dan Rumah Tangga                                             | 100,000,000 | 72,766,000 | 25,051,700        | 1,492,500   | 26,544,200   | 26.54 % | 689,800          |
| 051.0A Layanan Kelatasausahaan Pusat Manajemen Mutu                           | 100,000,000 | 72,766,000 | 25,051,700        | 1,492,500   | 26,544,200   | 26.54 % | 689,800          |
| 521211 Belanja Bahan                                                          | 7,290,000   | 0          | 5,737,900         | 1,492,500   | 7,230,400    | 99.18 % | 59,600           |
| 000452 Konsumsi Kegiatan ketatausahaan                                        | 7,290,000   | 0          | 5,737,900         | 1,492,500   | 7,230,400    | 99.18 % | 59,600           |
| 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                         | 80,334,000  | 62,380,000 | 17,953,800        | 0           | 17,953,800   | 22.35 % | 200              |
| 000453 Perdin                                                                 | 80,334,000  | 62,380,000 | 17,953,800        | 0           | 17,953,800   | 22.35 % | 200              |
| 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                    | 12,376,000  | 10,386,000 | 1,360,000         | 0           | 1,360,000    | 10.99 % | 630,000          |
| 000985 Perdin                                                                 | 12,376,000  | 10,386,000 | 1,360,000         | 0           | 1,360,000    | 10.99 % | 630,000          |

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2026  
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;  
Periode Maret 2026

Kementerian : 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Unit Organisasi 13 BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Satuan Kerja : 440807 SEKRETARIAT BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

Hal 1 dari 7

| Uraian                                                                     | Pagu Revisi    | Lock Pagu     | Realisasi TA 2026 |             |              |         | SISA<br>ANGGARAN |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------------|-------------|--------------|---------|------------------|
|                                                                            |                |               | Periode Lalu      | Periode Ini | s.d. Periode | %       |                  |
| JUMLAH SELURUHNYA                                                          | 11,490,100,000 | 1,689,363,000 | 250,935,006       | 385,535,033 | 636,470,039  | 5.54 %  | 9,164,266,961    |
| EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri                            | 11,490,100,000 | 1,689,363,000 | 250,935,006       | 385,535,033 | 636,470,039  | 5.54 %  | 9,164,266,961    |
| EC.7010 Manajemen Mutu                                                     | 11,490,100,000 | 1,689,363,000 | 250,935,006       | 385,535,033 | 636,470,039  | 5.54 %  | 9,164,266,961    |
| ABR Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan                               | 78,480,000     | 32,012,000    | 24,610,480        | 19,299,608  | 43,910,088   | 55.95 % | 2,557,912        |
| ABR.001 Rekomendasi Kebijakan Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan | 78,480,000     | 32,012,000    | 24,610,480        | 19,299,608  | 43,910,088   | 55.95 % | 2,557,912        |
| Hasil Perikanan                                                            | 78,480,000     | 32,012,000    | 24,610,480        | 19,299,608  | 43,910,088   | 55.95 % | 2,557,912        |
| 051 Harmonisasi Persyaratan/Ketentuan Negara Mitra dan                     | 78,480,000     | 32,012,000    | 24,610,480        | 19,299,608  | 43,910,088   | 55.95 % | 2,557,912        |
| Negara Tujuan Ekspor                                                       | 78,480,000     | 32,012,000    | 24,610,480        | 19,299,608  | 43,910,088   | 55.95 % | 2,557,912        |
| 051.0A Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan        | 42,630,000     | 4,117,000     | 24,060,480        | 12,452,770  | 36,513,250   | 85.65 % | 1,999,750        |
| 521211 Belanja Bahan                                                       | 13,025,000     | 0             | 6,753,500         | 4,272,500   | 11,026,000   | 84.65 % | 1,999,000        |
| 000264. Konsumsi dan kupadan rapat                                         | 13,025,000     | 0             | 6,753,500         | 4,272,500   | 11,026,000   | 84.65 % | 1,999,000        |
| 522151 Belanja Jasa Profesi                                                | 2,325,000      | 2,325,000     | 0                 | 0           | 0            | 0.00 %  | 0                |
| 000266. Nara Sumber pakar                                                  | 2,325,000      | 2,325,000     | 0                 | 0           | 0            | 0.00 %  | 0                |
| 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                      | 27,280,000     | 1,792,000     | 17,306,980        | 8,180,270   | 25,487,250   | 93.43 % | 750              |
| 000267. Perdin                                                             | 27,280,000     | 1,792,000     | 17,306,980        | 8,180,270   | 25,487,250   | 93.43 % | 750              |
| 051.0C Pendampingan Inspeksi SJMKHP dari Negara Tujuan Ekspor              | 35,850,000     | 27,895,000    | 550,000           | 6,846,838   | 7,396,838    | 20.63 % | 558,162          |
| 521211 Belanja Bahan                                                       | 4,050,000      | 0             | 550,000           | 2,942,500   | 3,492,500    | 86.23 % | 557,500          |
| 000272. Konsumsi dan kupadan rapat                                         | 4,050,000      | 0             | 550,000           | 2,942,500   | 3,492,500    | 86.23 % | 557,500          |
| 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                      | 31,800,000     | 27,895,000    | 0                 | 3,904,338   | 3,904,338    | 12.28 % | 662              |
| 000946. Perdin                                                             | 31,800,000     | 27,895,000    | 0                 | 3,904,338   | 3,904,338    | 12.28 % | 662              |
| AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria                                 | 34,019,000     | 0             | 0                 | 0           | 0            | 0.00 %  | 34,019,000       |
| AFA.001 NSPK standarisasi sistem jaminan mutu hasil KP                     | 34,019,000     | 0             | 0                 | 0           | 0            | 0.00 %  | 34,019,000       |
| 051 Penyusunan NSPK Bidang Manajemen Mutu                                  | 34,019,000     | 0             | 0                 | 0           | 0            | 0.00 %  | 34,019,000       |
| 051.0A Penyusunan NSPK                                                     | 6,075,000      | 0             | 0                 | 0           | 0            | 0.00 %  | 6,075,000        |
| 521211 Belanja Bahan                                                       | 6,075,000      | 0             | 0                 | 0           | 0            | 0.00 %  | 6,075,000        |
| 000276. Konsumsi dan kupadan rapat                                         | 6,075,000      | 0             | 0                 | 0           | 0            | 0.00 %  | 6,075,000        |
| 051.0B Pelaksanaan Identifikasi, Monitoring dan Evaluasi NSPK              | 27,944,000     | 0             | 0                 | 0           | 0            | 0.00 %  | 27,944,000       |
| 521211 Belanja Bahan                                                       | 5,234,000      | 0             | 0                 | 0           | 0            | 0.00 %  | 5,234,000        |

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2026  
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;  
Periode Maret 2026

Kementerian : 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Unit Organisasi 13 BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Satuan Kerja : 440807 SEKRETARIAT BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

Hal 1 dari 2

| Uraian                                                                                      | Pagu Revisi | Lock Pagu  | Realisasi TA 2026 |             |              |         | SISA<br>ANGGARAN |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------|-------------|--------------|---------|------------------|
|                                                                                             |             |            | Periode Lalu      | Periode Ini | s.d. Periode | %       |                  |
| JUMLAH SELURUHNYA                                                                           | 760,086,000 | 45,000,000 | 27,690,104        | 97,278,603  | 124,968,707  | 16.44 % | 590,117,293      |
| WAProgram Dukungan Manajemen                                                                | 760,086,000 | 45,000,000 | 27,690,104        | 97,278,603  | 124,968,707  | 16.44 % | 590,117,293      |
| WA.3987 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan               | 760,086,000 | 45,000,000 | 27,690,104        | 97,278,603  | 124,968,707  | 16.44 % | 590,117,293      |
| Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan                                                           | 760,086,000 | 45,000,000 | 27,690,104        | 97,278,603  | 124,968,707  | 16.44 % | 590,117,293      |
| EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal                                                     | 760,086,000 | 45,000,000 | 27,690,104        | 97,278,603  | 124,968,707  | 16.44 % | 590,117,293      |
| EBA.994 Layanan Perkantoran                                                                 | 760,086,000 | 45,000,000 | 27,690,104        | 97,278,603  | 124,968,707  | 16.44 % | 590,117,293      |
| 002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor                                                     | 760,086,000 | 45,000,000 | 27,690,104        | 97,278,603  | 124,968,707  | 16.44 % | 590,117,293      |
| 002.0F Operasional dan Pemeliharaan Kantor Pusat Manajemen Mutu                             | 760,086,000 | 45,000,000 | 27,690,104        | 97,278,603  | 124,968,707  | 16.44 % | 590,117,293      |
| 521111 Belanja Keperluan Perkantoran                                                        | 101,087,000 | 0          | 1,769,820         | 3,824,803   | 5,594,623    | 5.53 %  | 95,492,377       |
| 000650. Biaya Keperluan Kantor                                                              | 55,828,000  | 0          | 1,252,820         | 340,000     | 1,592,820    | 2.85 %  | 54,235,180       |
| 000660. Langganan Surat Kabar                                                               | 5,869,000   | 0          | 0                 | 0           | 0            | 0.00 %  | 5,869,000        |
| 000661. Biaya Jamuan Tamu                                                                   | 12,000,000  | 0          | 517,000           | 3,484,803   | 4,001,803    | 33.35 % | 7,998,197        |
| 000662. Pajak Kendaraan Roda 4                                                              | 24,455,000  | 0          | 0                 | 0           | 0            | 0.00 %  | 24,455,000       |
| 000663. Pajak Kendaraan Roda 2                                                              | 2,935,000   | 0          | 0                 | 0           | 0            | 0.00 %  | 2,935,000        |
| 521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat                                             | 6,411,000   | 0          | 1,400,000         | 0           | 1,400,000    | 21.84 % | 5,011,000        |
| 000664. Biaya Pengiriman Surat                                                              | 6,411,000   | 0          | 1,400,000         | 0           | 1,400,000    | 21.84 % | 5,011,000        |
| 521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja                                               | 38,640,000  | 0          | 3,220,000         | 3,220,000   | 6,440,000    | 16.67 % | 32,200,000       |
| 000665. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar) | 21,000,000  | 0          | 1,750,000         | 1,750,000   | 3,500,000    | 16.67 % | 17,500,000       |
| 000666. Honorarium Bendahara Pembantu                                                       | 5,860,000   | 0          | 490,000           | 490,000     | 980,000      | 16.67 % | 4,900,000        |
| 000667. Honorarium Staf Pengelola keuangan                                                  | 11,760,000  | 0          | 980,000           | 980,000     | 1,960,000    | 16.67 % | 9,800,000        |
| 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya                                                   | 62,400,000  | 45,000,000 | 0                 | 0           | 0            | 0.00 %  | 17,400,000       |
| 000670. Perlengkapan Pegawai Pusat                                                          | 48,000,000  | 45,000,000 | 0                 | 0           | 0            | 0.00 %  | 3,000,000        |
| 000671. Biaya Tol Pimpinan                                                                  | 14,400,000  | 0          | 0                 | 0           | 0            | 0.00 %  | 14,400,000       |
| 521211 Belanja Bahan                                                                        | 45,108,000  | 0          | 0                 | 0           | 0            | 0.00 %  | 45,108,000       |
| 000672. PengadaanPercetakan Dokumen, Brosur, Buku, Leaflet, Akrilik                         | 17,500,000  | 0          | 0                 | 0           | 0            | 0.00 %  | 17,500,000       |
| 001059. Snack dan Konsumsi                                                                  | 27,608,000  | 0          | 0                 | 0           | 0            | 0.00 %  | 27,608,000       |
| 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi                                            | 50,000,000  | 0          | 0                 | 0           | 0            | 0.00 %  | 50,000,000       |



